

Pendidikan Politik Membentuk Pribadi Mandiri

Fatimah Achmad, SH

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, DPR-RI.

Peran politik wanita Indonesia di masa silam dan sekarang memang berbeda. Dulu, bersama-sama kaum pria, mereka merebut dan mengisi kemerdekaan. Fenomena perjuangannya juga sangat berbeda. Wanita dulu mempunyai keberanian, keuletan dan ketabahan sangat luar biasa. Meskipun saat ini mereka mengalami kemajuan pesat di segala bidang, tetapi wanita yang bergiat di bidang politik, berdasarkan rasio 10 pria berbanding 1 wanita, terlihat masih berjalan sangat lambat. Tampaknya wanita masih takut terjun ke politik. Bidang politik dianggap milik kaum laki-laki yang penuh dengan kekerasan.

Perbaikan nasib bangsa selama ini masih lebih banyak digerakkan dalam lembaga-lembaga politik. Namun, pendidikan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi membuat kaum wanita seperti takut dengan politik. Pendidikan politik tidak boleh dilakukan di sekolah dan perguruan tinggi sehingga barangkali ini yang menyebabkan hampir tidak ada wanita lulusan universitas yang menjadi pemimpin. Mereka yang lulusan universitas lebih banyak menjadi pegawai biasa. Artinya, upaya membuat aktif wanita, baik secara kualitas maupun kuantitas, di bidang politik adalah melalui pendidikan politik.

Pribadi Mandiri

Selama ini proporsi wanita yang duduk di DPR terlihat tidak proporsional. Dari 500 anggota DPR hanya ada 56 wanita. Dalam tubuh DPP PDI sendiri awalnya berlangsung serupa. Baru pada tahun 1986 mulai dimasukkan 2 wanita. Pimpinan partai waktu

itu kebetulan mempunyai kemauan untuk memajukan wanita. Wanita harus diikuti sertakan dan dimasukkan dalam kepengurusan bila ada konperensi cabang, konperensi daerah, musyawarah cabang. Begitu pula ketika berlangsung pemilihan anggota DPR untuk Tingkat I dan II. Jadi, masih ada semacam tekanan dari atas ke bawah. Karena sudah biasa ditempa dan ditanamkan sekitar 7 tahun, maka wajar beberapa ketua cabang bahkan Ketua Umum dan Ketua Fraksi PDI sekarang adalah seorang wanita.

Sebenarnya wanita Indonesia mempunyai potensi sangat besar dan berada dalam posisi strategis, sehingga kita harus sungguh-sungguh memperhatikannya. Meskipun mempunyai potensi sangat besar, umumnya tingkat pendidikannya masih sangat rendah. Melahirkan, mendidik, dan membesarkan anak harus diakui merupakan posisi strategis yang sangat erat berkaitan dengan generasi penerus bangsa. Di samping itu, kemampuannya memenuhi dan menyelamatkan kebutuhan keluarga tidaklah kecil.

Tujuan paling penting sekarang adalah bagaimana memberikan pendidikan politik kepada wanita Indonesia supaya mempunyai pribadi mandiri dan tidak menjadi beban pembangunan. Pribadi mandiri adalah percaya akan kemampuan sendiri, produktif, mampu menentukan apa yang terbaik bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya, juga bersikap ramah dan mau mendengar pendapat orang lain. Bila sudah mempunyai pribadi mandiri, tidak tergantung asal sekolah atau telah mengenyam pendidikan tinggi, dia pasti akan berani terjun kemana pun. Pendidikan untuk menjadi pribadi mandiri memang harus terus



Fatimah Achmad, SH

diupayakan. Bila sudah mempunyai pribadi mandiri, dia percaya pada kemampuannya sendiri dan produktif. Artinya, dia bisa membuat perencanaan hari depan dan mampu menentukan apa yang terbaik bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negaranya, kemudian bersikap ramah. Perjuangan membentuk pribadi mandiri, yang tidak harus melewati pendidikan formal namun cukup bisa baca dan tulis, seharusnya dimulai dari desa.

Wanita, kalau mempunyai pribadi mandiri, akan mampu bersatu memperbaiki keadaan. Tetapi bila dia sendiri takut, tidak mempunyai pribadi mandiri, akhirnya haya akan terus tergantung. Dengan pribadi mandiri dia bisa menentukan apa yang terbaik, terutama, bagi dirinya entah ingin sekolah, bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Semua ini dilandasi sifat-sifat produktif. Wanita harus menemukan jati dirinya lebih dahulu. Dengan pribadi mandiri, jati diri harus ditemukannya. Bila jati diri sudah ditemukan, dia pasti mampu menentukan arah hendak melangkah.

Memberi Kesempatan

Wanita-wanita Indonesia dapat menjadi pemimpin nasional di masa depan bila diberi kepercayaan. Faktor budaya dan psikologis

membuat wanita Indonesia, meskipun UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak ada larangan bagi pria atau wanita untuk menjadi presiden, sulit mencapai posisi itu. Artinya, hal ini masih tergantung pada kemauan politik bangsa yang mampu membuat apakah sudah waktunya wanita menjadi pemimpin nasional. Bila kemauan bangsa sudah terbuka, maka dapat dicari siapa orangnya.

Di sisi lain, arogansi pria juga harus mulai dihilangkan melalui pendidikan politik di rumah tangga, sekolah, dan lingkungan. Karena itu dalam

GBHN, dengan satu fraksi yang memperjuangkan, tercantum kalimat meningkatkan kesempatan wanita dalam pengambilan keputusan politik. Ini bukan perjuangan yang tidak berat. Kualitas wanita yang berada di DPR tidak kalah dengan pria. Namun, bila ada penugasan tertentu, biasanya yang didahulukan adalah kaum pria. Fraksi PDI sendiri pun cukup mempunyai kemampuan, hanya kesempatan saja yang tidak diberikan. Bila kesempatan diberikan, wanita pasti bisa menjalankan.

Umumnya wanita-wanita yang menduduki jabatan menteri mencapai keberhasilan. Namun, dalam kabinet-kabinet mendatang kita mengharapkan supaya lebih terbuka kesempatan bagi wanita untuk menjadi menteri tidak hanya sebagai Menteri Sosial atau Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Untuk posisi kementerian yang lebih strategis memang masih jauh dan lama. Inipun harus dikembalikan pada kepercayaan kaum pria.

Sementara itu keikutsertaan partai politik untuk duduk dalam kabinet masih harus melihat satu hal. Sudah waktunya kita menjalankan demokrasi yang menganut musyawarah mufakat, bukan negara dengan partai pemerintah atau partai oposisi dan minoritas atau mayoritas. Kita mengharapkan kabinet membawa semua kekuatan yang

mempunyai kemampuan. Banyak anggota partai politik yang mempunyai kemampuan dan seharusnya diikutsertakan di dalam kabinet, sehingga tanggung jawab dapat dipikul bersama.

Sebaiknya seorang menteri adalah mereka yang pernah menjadi anggota DPR. Memang belum ada yang dari partai politik menjadi menteri karena belum diberi kesempatan. Saya yakin masih banyak wanita Indonesia, baik dari PPP maupun PDI, yang sanggup menduduki posisi itu bila diberi kesempatan. Barangkali persoalannya harus dikembalikan kepada pendidikan politik yang memberi kepercayaan dan kesempatan pada wanita.

Kita pernah dijajah selama 350 tahun. Sejak dulu sudah ditanamkan bagaimana wanita harus dipingit sebelum memasuki jenjang perkawinan. Belum lagi kehadiran istilah *swarga nunut neraka katut* atau sebagai *konco wingking* yang sebetulnya

merendahkan wanita. Padahal dalam alam kemerdekaan saat ini wanita dan pria adalah mitra. Kemitraan ini sudah diperjuangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pada tahun 1928, selain perjuangan menghilangkan diskriminasi dan menghapuskan perbudakan. Walaupun demikian praktek yang berjalan sekarang ini masih sejalan dengan tuntutan kongres kaum perempuan itu, terutama dalam hal diskriminasi dan perbudakan wanita. Masih terjadi diskriminasi dalam pengupahan buruh. Beberapa perusahaan bahkan memberlakukan bermacam persyaratan untuk tidak menerima pekerja wanita karena dikatakan tidak produktif. Perbudakan wanita sampai sekarang masih terlihat, hanya istilahnya semakin diperhalus dan sangat terselubung. Mungkin berlangsung semacam perbaikan atau perubahan, tetapi bila menyentuh dunia wanita terlihat berjalan amat lambat. ●

Menggalang Misi dan Visi Perjuangan Wanita

Ermalena M, Hs

Ketua I Fatayat Nahdlatul Ulama

Kami selalu menekankan agar wanita menyadari hak dan kewajibannya. Janganlah wanita menganggap diri sebagai pelengkap penyerta. Negara, dengan peraturan perundangan yang ada, sesungguhnya sudah menjamin hak dan kewajiban wanita. Masalahnya, ada kerancuan antara kewajiban yang dimunculkan oleh produk sejarah dengan kewajiban keseharian dalam rumah tangga dan masyarakat. Tampaknya masih banyak kendala interen yang membuat wanita tidak mampu berpacu dengan kondisi yang sudah disiapkan.

Pola sejarah yang hadir dalam tradisi kehidupan masyarakat Indonesia menganggap

wanita sebagai "orang kedua" dalam masalah apapun. Peningkatan taraf pendidikan bagi wanita Indonesia yang sekarang justeru didengungkan dan menjadi budaya masyarakat merupakan salah satu bukti bahwa wanita selalu dinomorduakan. Misalnya, buku pelajaran SD masih mencantumkan "Ali membantu ayah di sawah" atau "Ani membantu ibu di dapur." Ketika itu pola pendidikan sudah melakukan pembedaan sangat jelas antara laki-laki dan perempuan. Mata rantai yang menyebutkan wanita sebagai produk sejarah dan selalu dinomorduakan memang harus diputuskan. Namun upaya ini memerlukan waktu yang panjang.

Wanita Indonesia yang tidak bisa menempati posisi tertentu pada keadaan tertentu janganlah semata-mata disalahkan kepada kaum wanita. Selama ini penetap kebijakan secara struktural di mana pun laki-laki lebih dominan. Bila diadakan pemungutan suara, wanita pasti kalah. Misal lain ketika diadakan pemilihan untuk jabatan tertentu, biasanya yang kemudian menduduki posisi ini adalah pria. Berbeda dengan negara Barat yang sudah sangat mempercayai kemampuan seorang wanita. Saya ingin wanita Indonesia juga bisa ditempatkan dan dilihat demikian oleh masyarakat Indonesia sendiri. Karena itu kepercayaan kaum laki-laki terhadap wanita memang masih perlu diperjuangkan. Kaum wanita sendiri tidak perlu lagi meneriakkan emansipasi wanita. Masalah ini sudah diselesaikan sejak awal. Bahkan negara memberi jaminan dengan kemitrasejajaran.

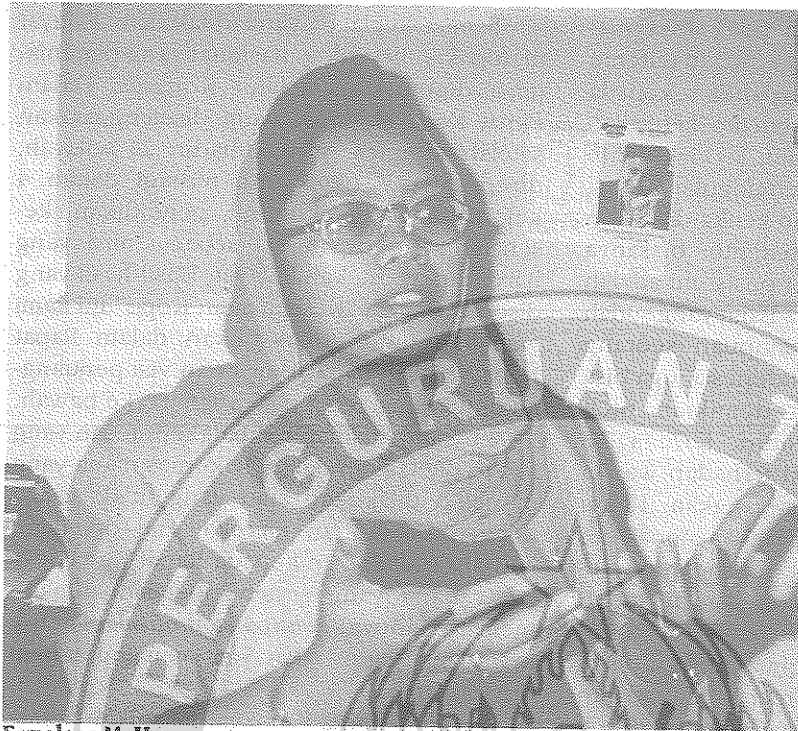
Kini yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana melakukan proses penyadaran pada semua lapisan, termasuk di dalam tubuh wanita itu sendiri. Barangkali salah satu pertanyaan yang patut dikemukakan adalah Indonesia memiliki banyak aktivis perempuan, tetapi apakah temuan-temuan mereka bisa diakses sampai ke wanita-wanita marjinal yang tertinggal. Tiadanya "benang merah" antara aktivis perempuan dengan beberapa teman yang mempunyai umat di bawah menyebabkan temuan-temuan aktivis perempuan tidak bisa diakses. Kita cenderung melakukan dan memperjuangkan bagian per bagian. Banyak yang memperjuangkan tetapi tidak tahu atau siapa yang bisa melakukan apa sehingga menjadi bola salju besar yang dapat menyelesaikan banyak hal.

Pemberdayaan Lewat Organisasi

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1986, organisasi Fatayat tercatat memiliki 5 juta umat wanita yang tersebar di 320 daerah tingkat II dan berada di 26 provinsi. Bila dikatakan 15 persen penduduk Indonesia masih miskin, saya melihat sebagian besar umat kami masuk dalam jumlah yang miskin itu. Mereka adalah wanita-wanita marjinal dari kalangan menengah bawah yang sangat heterogen.

Semua kegiatan yang dilakukan Fatayat merupakan kebijakan nasional yang pertamanya diputuskan melalui Kongres. Dalam Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan setelah Kongres, yang dihadiri 24 wilayah, disepakati 17 *item* yang terbagi dalam 4 kelompok yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan organisasi sebagai misi yang harus diperjuangkan Fatayat. Hasil-hasil yang disebut sebagai "Kesepakatan Kopo" ini kami wajjibkan untuk dimasukkan dalam Rapat Kerja Wilayah supaya misi dan visi perjuangan untuk umat tetap dijaga sampai ke bawah. Di sini kami melihat kembali keputusan yang sudah ditetapkan dalam Rakernas mana yang mungkin dilakukan atau yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal demikian lalu disosialisasikan kepada Rapat Kerja tingkat cabang yang secara operasional akan menjalankannya. *Political commitment* untuk menjalankan misi dan visi memang sangat diperlukan.

Kami meminta berbagai masukan tatkala Kongres dan Rakernas. Dari masukan-masukan itu kemudian teman-teman melakukan analisa SWOT yang turut difasilitasi oleh beberapa kaum pria. Dari hasil analisis SWOT kami melihat, misalnya, kebijakan atau program pemerintah yang bisa ditunjang. Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan target besar pemerintah yang tidak bisa dipisahkan. Dengan menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki Fatayat, kita memilih 4 besar, yaitu: ekonomi, pendidikan, kesehatan dan organisasi. Tanpa manajemen organisasi yang baik kita tidak mungkin melakukan ketiganya. Berdasarkan itulah kita menetapkan program-program. Tidak seperti, misalnya, Departemen Koperasi atau Departemen Kesehatan mempunyai program ini itu kemudian kita masuk begitu saja. Kita tetap merujuk pada kemampuan kita dan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dari sekian *list*, kita akan melakukan apa yang paling mungkin bisa dilakukan dengan kekuatan dan kemampuan yang ada. Tetapi yang jelas semua program sudah berada dalam satu paket yang dirancang matang untuk lima tahun. Secara bertahap *master plan* ini dievaluasi di pusat atau langsung ke daerah kerja.



Ermalena M, Hs

Fatayat sudah mempersiapkan 6.500 tenaga mediator dan motivator terlatih yang difasilitasi oleh 600 *supervisor*. Tenaga *supervisor* ini akan kami latih bagaimana mengelola informasi agar sampai ke kelompok sasaran secara benar. Paling tidak kami mencoba menyampaikan pesan bahwa wanita mempunyai posisi sejajar dengan laki-laki. Di samping itu sistem kerja yang kami pergunakan berdasarkan *need assesment*. Misalnya, jumlah pekerja wanita kelompok Fatayat sangat banyak di Jawa Timur. Karena itu kami memilih dan mengembangkan Biro Konsultasi Wanita Pekerja Bermasalah untuk membantu wanita pekerja bermasalah di provinsi itu. Sedangkan di Yogyakarta kami justru menekankan pada biro konsultasi untuk anak dan wanita bermasalah, karena di wilayah ini kebanyakan umat kami adalah wanita dari kalangan perguruan tinggi dan berpendidikan lebih baik. Di Jawa Tengah kita bicara wanita bermasalah, karena paling banyak dihadapi adalah pelecehan wanita, umpamanya perceraian. Berdasarkan pengalaman akhirnya diputuskan setiap daerah mempunyai pendekatan yang berbeda.

Di NTB, ada satu yayasan bernama Bina

Sejahtera yang lebih pada proses pendidikan, Kita munculkan beberapa Taman Kanak-kanak di tempat yang sama sekali tidak ada sarana pendidikan. Namun TK bukan sebagai prioritas, tetapi menyadarkan masyarakat bahwa pendidikan perlu dan bukan hanya untuk laki-laki. Kami pun membina wanita-wanita putus sekolah di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita juga mengatakan kepada masyarakat di sana bahwa wanita mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi semua

yang kita lakukan lebih mengarah kepada bagaimana mereka paham tentang posisi wanita.

Kendalanya memang sangat banyak. Teman-teman di lingkungan Fatayat ada yang belum paham dan mengetahui secara persis. Sebagian dari mereka masih mempunyai pikiran "tidak begitu caranya, kita tetap begini dan laki-laki harus begitu." Meskipun demikian kami tetap melakukan kegiatan yang mengarah pada proses penyadaran posisi wanita di tempat-tempat yang tersulit sekalipun. Setelah didekati dengan pesan-pesan yang mengena dan enak, ternyata mudah sekali. Menyatukan visi memang memerlukan waktu.

Visi ini kemudian dicoba untuk dimunculkan melalui beberapa diskusi berseri sambil mengundang kelompok laki-laki yang juga peduli pada persoalan perempuan. Kita cenderung mengatakan laki-laki tidak *fair*. Sebenarnya bukan tidak *fair*. Masalahnya hanya tidak paham bahwa yang kita tuntut adalah hak wanita; kemitrasejajaran. Karena itu kita mengajak semua orang, termasuk laki-laki, untuk juga betul-betul paham. Namun kendala eksternal yang sangat dirasakan

adalah pemahaman yang belum merata. Kita berjuang "di dalam" sehingga terjadi pemahaman secara utuh. Tetapi apakah wanita yang berada "di luar" juga memiliki pemahaman yang sama. Kegiatan seminar yang kami selenggarakan merupakan salah satu upaya mempertemukan kedua kutub itu secara baik sambil berbagi pengalaman dan informasi. Paling tidak beberapa hal menjadi sama bila sudah berbagi pengalaman dan informasi.

Bila sepakat memperjuangkan hak wanita sebagai misi, maka budaya yang sekarang berlaku harus diubah. Meskipun sejak tahun 1979 sampai sekarang tidak terlalu banyak terjadi perubahan, tetap saya anggap cukup berarti. Kami sangat bersyukur pengurus Fatayat kini semakin banyak yang aktif. Ini merupakan satu indikator bahwa kita berhasil mengajak teman-teman untuk sepakat memperjuangkan hak wanita. Di bawah pun berlangsung hal serupa yang terlihat sangat dinamis. Ketika itu mereka sepakat menjadi pemimpin yang mempunyai tugas dan tanggung jawab. Motivasi-nya sangat sederhana. Mereka tidak digaji dan tidak mendapat apa-apa, tetapi akan mendapatkan "pembayaran gaji akherat." Yang jelas kita mengetuk kalbu terdalam mereka bahwa yang diperjuangkan adalah masalah wanita.

Selain mensosialisasikan misi dan visi, Fatayat pun mencoba memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya. Bisa dibayangkan *target-group* Fatayat bila berjalan dengan visi dan misi yang sama. Selama ini kita melakukan semua secara struktural. Artinya, masyarakat Fatayat masih berpegang pada pola panutan. Tidak akan menjadi masalah bila kita menyampaikan pesan secara baik dan benar diikuti pula oleh sistem panutan yang berjalan. Misalnya, saya berdiskusi dengan Tuan Guru di NTB tentang misi dan visi perjuangan Fatayat, ketika itu pula Tuan Guru akan menyampaikannya kepada lapisan

masyarakat tertentu sehingga menjadi suatu gerakan. Jadi, jangan melakukan dengan kekuatan yang tanggung, lakukanlah dengan kekuatan yang memang disadari persis mempunyai akses ke bawah. Selama ini sistem panutan dan ketaatan kepada pimpinan masih berjalan di seluruh organisasi kemasyarakatan.

Kami bekerja bukan secara potongan tetapi sekaligus menggebrak semua dengan harapan Fatayat bisa memutus beberapa mata rantai. Produk sejarah yang selama ini kita jalani sebetulnya dapat diatasi bila dilakukan secara benar. Karena Fatayat adalah Islam maka secara benar kita akan melihat dan melakukan dari sisi Islam. Kita pun mengajak bicara aktivis-aktivis perempuan. Justeru teman-teman yang menggeluti kegiatan keormasan kami berharap juga ikut terlibat dalam kegiatan yang sama. Bisa dibayangkan, kalau satu sekian hasilnya, bila dua lebih banyak, tiga akan jauh lebih banyak. Dalam arti visi dan misi kita harus sama. Kalau berbeda, kita akan melihat percepatan penyampaian pesan-pesan kewanitaan, dalam arti kemitrasejajaran, menjadi amat sangat pelan.

Kami sedang merencanakan beberapa program bekerja sama dengan pihak yang peduli.

Dalam hal ini kita mencoba mencari benang merah dan bila mungkin diperjelas. Fatayat pun sangat siap menjadi mediator bagi kegiatan kewanitaan. Dalam seminar "Peran Serta Wanita Dalam Pesta Demokrasi 1997" kami sebetulnya bukan membicarakan politik praktis, tetapi bagaimana menyadarkan wanita supaya tidak ikut-ikutan memilih. Wanita harus paham bahwa dia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Hak yang dimilikinya juga dapat digunakan dalam semua sisi kehidupan. Ini yang kami sebut dengan kegiatan-kegiatan politik. Jadi bukan politik praktis ingin masuk ke dalam parpol atau di Golkar. Fatayat sama sekali tidak akan menggiring warganya untuk memilih salah satu OPP.

...kami sebetulnya bukan membicarakan politik praktis, tetapi bagaimana menyadarkan wanita supaya tidak ikut-ikutan memilih. Wanita harus paham bahwa dia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

Kami mencoba membangun kelompok yang bekerjasama dengan pihak luar sejak tahun 1989. Hasilnya cukup baik dan pembinaan sampai sekarang masih berlanjut. Beberapa teman sempat dikirim ke luar negeri untuk belajar dan melihat kemungkinan hal-hal yang bisa dijadikan tolok ukur, bukan untuk diterapkan. Ketika sepakat bahwa itu bisa dijadikan sebagai model maka akan kita lakukan. Kehadiran wanita bukan karena mengemis atau belas kasihan, tetapi karena memang dia punya kemampuan. Karena itu dia harus tahu persis posisinya sebagai wanita yang mempunyai hak, tanggung jawab dan kewajiban, termasuk dalam pesta demokrasi. Tujuan kita jelas memberikan wawasan kepada seluruh wanita terhadap hak dan kewajiban di negara ini. Perjalanan masih panjang dan sangat melelahkan, karena itu saya berharap makin banyak pihak yang turut terlibat. Saya menghormati teman laki-laki yang mempunyai kepedulian tinggi pada masalah-masalah perempuan. Kepedulian mereka menjadi semacam dorongan tersendiri bagi teman-teman perempuan. Berbicara mitra berarti kita tidak mungkin berjuang sendiri.

Bila dibandingkan dengan negeri lain, kita seharusnya berbesar hati melihat kemajuan yang telah dicapai wanita Indonesia. Posisi wanita di negeri-negeri itu masih sangat jauh dari apa yang dirasakan oleh wanita Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana wanita Indonesia mensyukuri secara baik dan menempatkannya secara benar. Fatayat sendiri mempersiapkan segalanya dalam kerangka kerja yang terprogram. Beberapa pihak memang mempunyai program yang sama. Tetapi kami sama sekali tidak sepakat melihat program yang disodorkan mereka. Dengan mengerjakan program mereka berarti seluruh program yang kita siapkan menjadi paket yang tidak utuh. Hal lain yang tidak kita sepakati adalah menstimulan kegiatan pihak lain. Fatayat tidak latah dan juga tidak mencari sesuatu karena kebutuhan orang lain. Namun Fatayat tetap melihat tujuan perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman dan sangat terbuka bagi seluruh aktivis perempuan.

Kami mempunyai keyakinan bahwa target yang ditetapkan untuk tiga tahun dapat

sampai ke bawah bila perjuangan dilakukan secara benar. Misalnya, program kelangsungan hidup anak (*child development*) bekerjasama dengan UNICEF ternyata berhasil dengan baik dan akan dilanjutkan lima tahun ke depan. Begitu pula kerjasama kami dengan salah satu *funding* dari Amerika yang melakukan penelitian sistem reproduksi wanita pada 32 sekolah di Jawa Timur. Kami masuk dengan cara intervensi gizi. Sistem reproduksi disepakati merupakan kelebihan wanita, tetapi apakah itu juga diperhatikan oleh bangsa sebagai bagian untuk memproduksi manusia berkualitas. Kami pun sedang merancang penelitian tentang pola pendidikan wanita. Bagaimana wanita bisa memperoleh pesan-pesan pembangunan dengan metoda sangat sederhana. Pola berantai kelompok diskusi yang menjadi pilihan diharapkan bisa membangun embrio pemahaman terhadap kondisi perempuan secara menyeluruh. Bila posisi dan fungsi wanita dapat dimaksimalkan, karena pendidikan atau kondisi sosial yang semakin membaik, pembangunan akan berlangsung dengan sangat cepat.

Selama ini pemerintah menanggapi positif program-program yang kami jalankan. Para menteri umumnya menyambut baik apa yang kami perjuangkan. Misalnya, akad kerjasama dengan Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil untuk melaksanakan program koperasi secara nasional yang bernama *an nissa* yang hanya ada di NU. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga secara spontan mengatakan ada dana kewirausahaan berjumlah cukup besar yang bisa digunakan Fatayat. Kami juga mengadakan pertemuan dengan Komisi VIII DPR-RI yang sangat memperhatikan masalah perempuan ketika bicara soal kemasyarakatan. Semua pihak kelihatan sudah tergelitik untuk ikut tampil, entah karena rangsangan formulasi Konperensi Wanita di Beijing.

Kami lebih sepakat melakukan dan melaksanakan semua program dengan cara swadana. Dana bantuan dari pihak luar dan lembaga-lembaga dunia lain hanya merupakan suplemen bagi kegiatan. Fatayat memiliki 8 departemen. Setiap departemen mempunyai tugas dan kegiatan masing-masing secara struktural mulai dari tingkat pusat,

provinsi, cabang, kecamatan, dan desa. Untuk menjalankan kegiatan selama 1 tahun di seluruh Indonesia setidaknya Fatayat membutuhkan dana sekitar 10 miliar rupiah. Namun suplemen yang selama ini kami terima tidak lebih dari 400 juta rupiah. Sedangkan sumbangan dalam bentuk swadana, bila dijumlah total, justeru sangat besar. Misalnya, kita mau mengadakan kegiatan tetapi tidak punya uang. Tetapi dari situ muncul orang-orang yang *concern* dengan mengatakan akan menanggung konsumsi, tempat, akomodasi, dan transportasi. Swadana seperti ini merupakan kekuatan umat yang jarang diperhatikan pemerintah.

Saya tidak tahu persis berapa sumbangan dari konglomerat atau donatur secara terpisah. Program di daerah-daerah bisa berjalan karena memang partisipasi dari beberapa pihak. Saya tidak berani mengatakan itu merupakan sumbangan konglomerat atau bukan konglomerat, tetapi yang jelas ada mereka-mereka yang punya uang "lebih" kemudian memberikan. Konsep kita adalah; zakat yang 2,5% bila dikelola secara baik dan benar mungkin lebih sampai kepada tujuan. Ini yang akan terus kita motivasi sehingga dapat terkumpul dana umat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Saya setuju bila media massa mengekspos dan mengungkap segala hal tentang perempuan dalam arti memberi informasi kepada khalayak bahwa ada peristiwa pelecehan dan kondisi yang memprihatinkan kaum wanita.

diberikan dalam bentuk kecantikan, keindahan tubuh, dan sebagainya bukan untuk itu. Keindahan justeru untuk disyukuri, namun bukan dengan cara-cara dikonteskan.

Saya setuju bila media massa mengekspos dan mengungkap segala hal tentang perempuan dalam arti memberi informasi kepada khalayak bahwa ada peristiwa pelecehan dan kondisi yang memprihatinkan kaum wanita. Kami dari organisasi tidak setuju ketika wanita diekspos untuk komersial dalam arti tidak wajar. Sejauh wajar dengan aturan-aturan yang berlaku, kita sepakat saja karena itu merupakan bagian dari pekerjaan. Dalam pertemuan dengan Menteri Penerangan, salah satu yang kita perjuangkan adalah segi pemberitaan. Kami memohon dengan sangat bahwa lebih baik kita melakukan *marketing* dengan cara lain. Di samping itu, dari sisi organisasi wanita, kami menghimbau kepada seluruh wanita Indonesia untuk menahan diri lalu memposisikan diri secara terhormat. Bukan hanya wanita, tetapi untuk laki-laki juga berlaku demikian.

Sebetulnya bukan hanya produk dalam negeri, tetapi juga tayangan telenovela yang melanda kita. Kerugian negara, kalau mau dihitung secara rinci, justeru sangat besar. Pekerja yang produktif sekalipun, jangan ibu rumah tangga, meninggalkan pekerjaannya hanya untuk menyaksikan tayangan televisi. Itu merupakan sisi produktivitas dan kerugian ekonomi yang dihadapi negara, belum lagi terhadap moral. Dalam pertemuan dengan beberapa pihak, kita menghimbau agar itu bisa diperbaiki, tetapi masalahnya tidak sederhana. Sekian yang berteriak, sekian banyak pula yang berteriak lain. Sekian yang tidak setuju, sekian banyak pula yang masih setuju. Siapa yang kuat dialah yang bisa mengakses. Jangan kaget kalau misalnya anak-anak SMP dan SMA yang baru lulus pun tidak menghargai diri sendiri. Aksi corat-coret yang dilakukan dianggap suatu

Media Massa dan Pelecehan

Sebagai orang Islam, apalagi wanita, saya tidak setuju dengan segala kontes atau lomba kecantikan. Islam punya aturan bahwa aurat harus ditutup. Islam menyenangi keindahan. Tetapi tidak dengan cara "mengadu" dan mempertontonkan tubuh semacam kontes kecantikan. Dalam beberapa pertemuan, kami seringkali mengatakan sangat tidak sepakat dengan hal itu. Dari segi aurat kita tidak sepakat. Dari segi wanita yang dieksploitasi seperti itu lebih tidak sepakat lagi. Sebetulnya posisi wanita yang mulia bukan untuk seperti itu. Anugerah Allah yang

happy. Mereka menganggap diri moderen, sedangkan orang tua dituduh kuno. Memang pelajaran dari luar yang ditayangkan televisi lebih melihat kemandirian, hak dan tanggung jawab anak yang justeru sangat berbeda dengan pola pendidikan yang kita tanamkan selama ini.

Gerakan dan Pemimpin Wanita

Saya menganggap sekarang ini sudah ada gerakan wanita. Sebagian besar upaya mereka memang masih dalam tahap penyadaran. Kita sudah dikatakan mitra sejajar. Wanita harus tahu bahwa mereka adalah mitra sejajar laki-laki, dan laki-laki juga harus tahu bahwa wanita adalah teman, bukan bawahan mereka seperti yang diberlakukan konsep *konco wingking*. Kini kita memasuki tahapan proses pemahaman sehingga yang terjadi adalah "hei laki-laki kasih *dong kauling*-nya untuk perempuan" dan perempuan pun menyerukan, "hei *kauling* kamu ada di sana." Tetapi untuk mendapatkan *kauling* itu anda harus mempunyai daya kemampuan. Laki-laki juga tidak berlaku bak sinterklas yang memberi semua begitu saja. Kita berharap secara proporsional wanita "menguasai" *kauling*-nya karena memang dia benar-benar memiliki kemampuan.

Jawaban yang diperoleh bisa saja tidak siap bila secara individu seorang wanita ditanyakan apakah siap menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Tetapi secara keseluruhan banyak teman wanita yang sudah siap. Tokoh-tokoh wanita Indonesia semakin banyak dan hadir dalam berbagai organisasi, misalnya di Kowani. Kualitas mereka terlihat semakin membaik. Dalam organisasi-organisasi lain dengan semakin ketatnya kriteria untuk menjadi seorang pemimpin, wanita ternyata bisa menjadi orang pertama. Setiap organisasi terus memperketat kriteria dengan harapan kualitas pemimpinnya men-

jadi lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, wanita sudah siap menjadi pemimpin bangsa. Tetapi hal ini harus dilihat secara lebih proporsional. Artinya, kriteria harus diperlakukan sama antara laki-laki dengan perempuan. Ketika seorang wanita sepekat menjadi pemimpin, ketika itu pula dia mempunyai kewajiban melaksanakan tugasnya. Berarti dia harus memiliki kemampuan atau persyaratan tertentu sehingga bisa menjalankan tugas secara benar. Kalau tidak, maka yang terjadi justeru pelecehan. Kenapa seorang yang terbukti tidak mampu, apalagi dikatakan orang itu adalah wanita, ditaruh dalam jabatan pimpinan. Kemampuan masih bisa diproses secara bersama. Misalnya, kita menambah bekal pendidikan dan pengetahuan yang menyangkut persyaratan untuk menjadi pimpinan.

Tentang wanita yang dapat duduk dalam parlemen seharusnya pula dilihat secara proporsional. Kita tahu persis angka pemilih perempuan tiga juta lebih banyak daripada pemilih laki-laki. Penetapan jumlah wanita yang dapat duduk di legislatif biasanya ditetapkan oleh forum partai politik dan Golkar. Dalam forum-forum pengambilan keputusan itu kaum pria terlihat masih dominan, sehingga

wanita yang diputuskan untuk mewakili bercermin pada jumlah wanita yang ada di organisasi bersangkutan. Umpamanya Golkar menargetkan 17% wanita untuk anggota legislatif. Sementara itu PDI mencanangkan 20%, tetapi PPP justeru kurang dari 10%. Kalau berdasarkan kesepakatan dan ditetapkan kriterianya, saya yakin wanita dalam organisasi sosial politik tersebut masing-masing mampu memenuhinya. Kalau kebetulan banyak wanita yang lebih mampu daripada laki-laki dan jumlahnya lebih dari 50%, kenapa tidak?

Paling penting adalah menentukan dan berpatokan pada kriteria siapa yang hendak duduk di parlemen. Kriteria umum adalah

**Wanita
harus tahu
bahwa mereka
adalah mitra
sejajar laki-laki,
dan
laki-laki juga
harus tahu
bahwa wanita
adalah teman,
bukan
bawahan mereka
seperti yang
diberlakukan
konsep
konco wingking.**

mempunyai wawasan, berpendidikan, berpengalaman organisasi. Orang yang pantas dan layak duduk di parlemen tentu harus sangat *general* dan mantap. Selain itu dia memenuhi pula kriteria yang ditentukan masing-masing OPP yang diberlakukan untuk setiap orang. Semua organisasi juga harus punya keberanian menetapkan prosentase. Kalau kita malah menuntut lebih dari 17%, karena jumlah pemilih wanita saja jauh lebih banyak. Mungkin agak sulit menyuarakan perempuan bila perempuan tidak ada di parlemen. Laki-laki bisa saja "mewakili," tetapi ada hal-hal yang tidak bisa dipahami alam laki-laki.

Sejauh ini wanita Indonesia sudah *committed* terhadap perjuangan perempuan. Bila tidak *committed* terhadap perjuangan perempuan, berapa pun jumlah wanita yang duduk di legislatif menjadi *nothing*. Serupa dengan laki-laki. Bila laki-laki di parlemen tidak memperjuangkan masalah laki-laki tentu semuanya menjadi sia-sia belaka. Harus dilihat benang merah bahwa kita tetap konsisten terhadap perjuangan yang dilakukan. Sebetulnya bukan bicara perjuangan antara perempuan dan laki-laki, tetapi perjuangan kualitas hidup pembangunan bangsa. Kemitraan merupakan salah satu tolok ukur bahwa kita adalah bangsa yang besar. ●

